Kementerian PPN/
Bappenas

LOKAKARYA KICK-OFF NASIONAL PROGRAM PPSP 2018

PPSP dan Sinergi Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman
Kementerian PPN/Bappenas

Jakarta, 13 Maret 2018

KEPESERTAAN PPSP

(berdasarkan Roadmap PPSP 2015-2019)

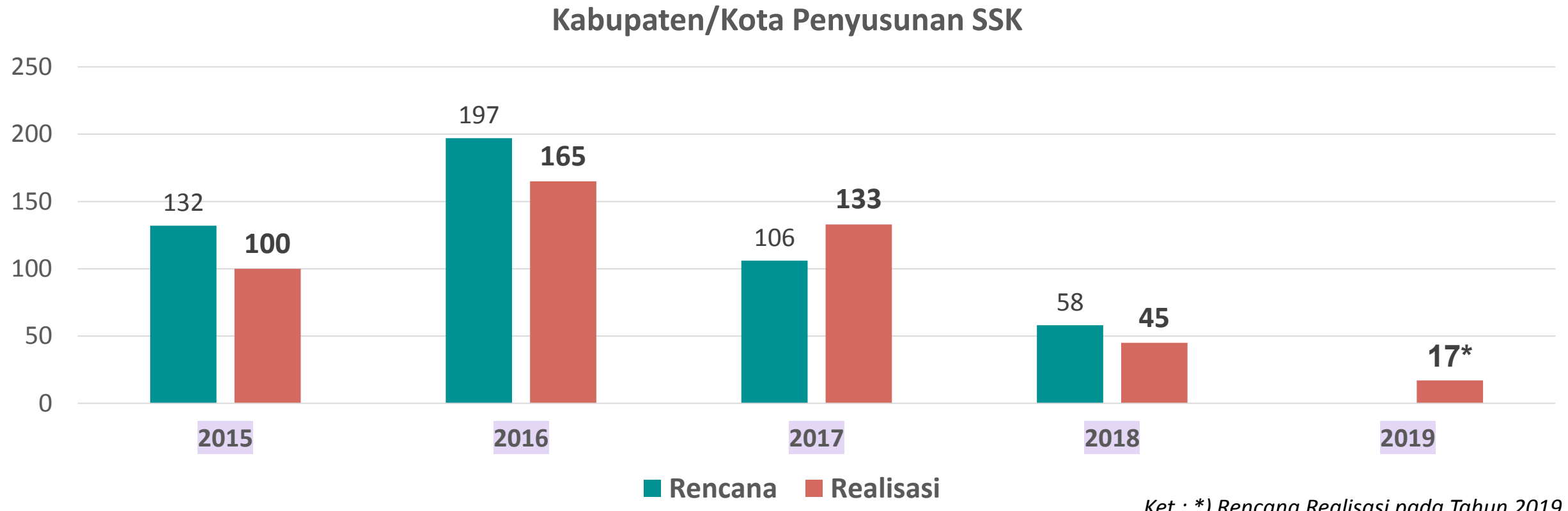

*Ket.: *) Rencana Realisasi pada Tahun 2019*

Rencana (Total: 493 kab/kota)

Realisasi (Total: 460 kab/kota)

Review Pelaksanaan PPSP

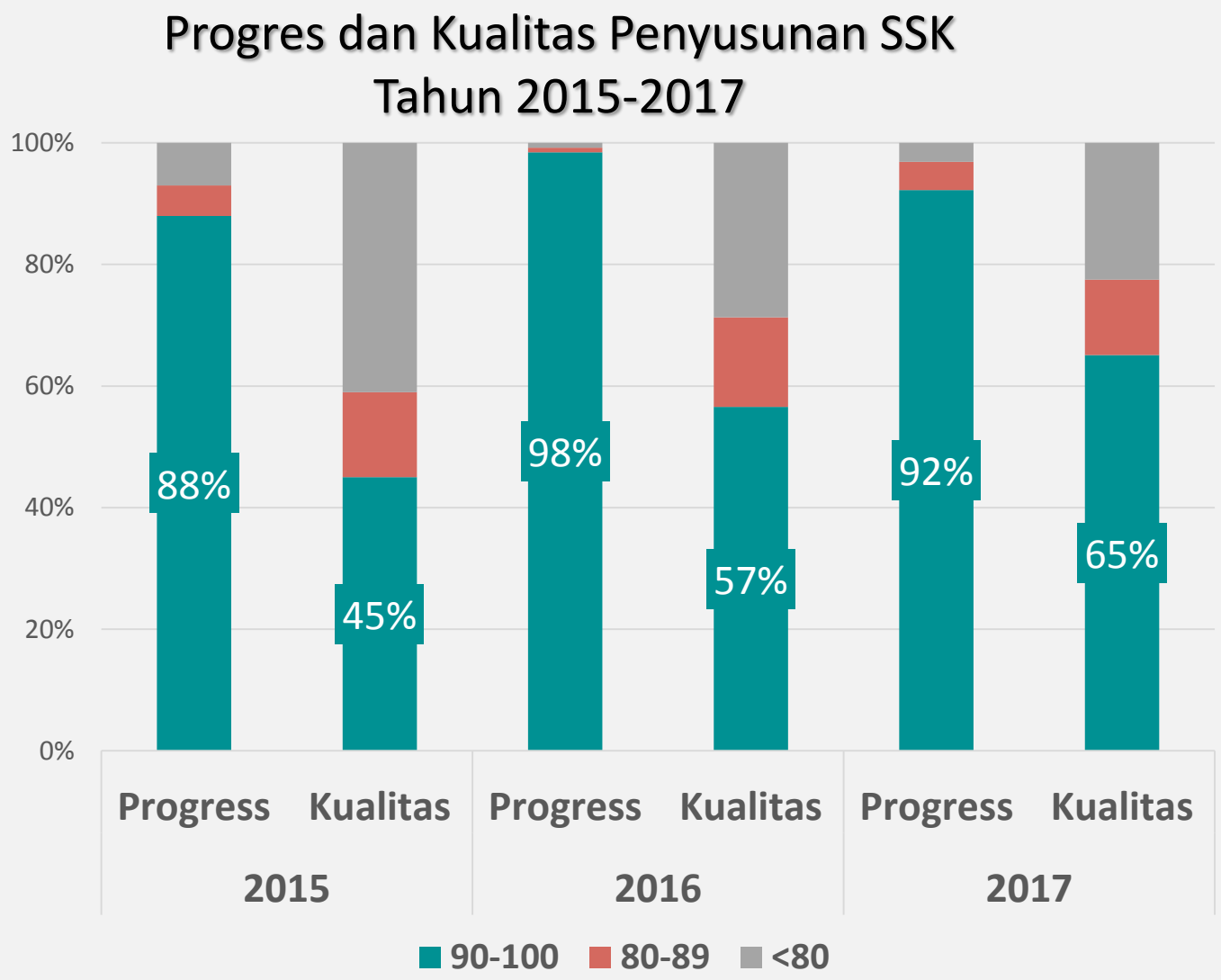

Sumber: Diolah dari Nawasis (per Maret 2018)

KENDALA

Persentase SSK yang baik meningkat tetapi masih berkisar 45-65%.

Masih ada sekitar 1%-7% SSK yang tidak diselesaikan setiap tahunnya.

TANTANGAN

- Pengawalan pemerintah daerah agar menghasilkan dokumen SSK yang berkualitas

Review PPSP 2017

Terdapat 15 Kabupaten/Kota Peserta PPSP 2017 yang Belum Menyelesaikan SSK

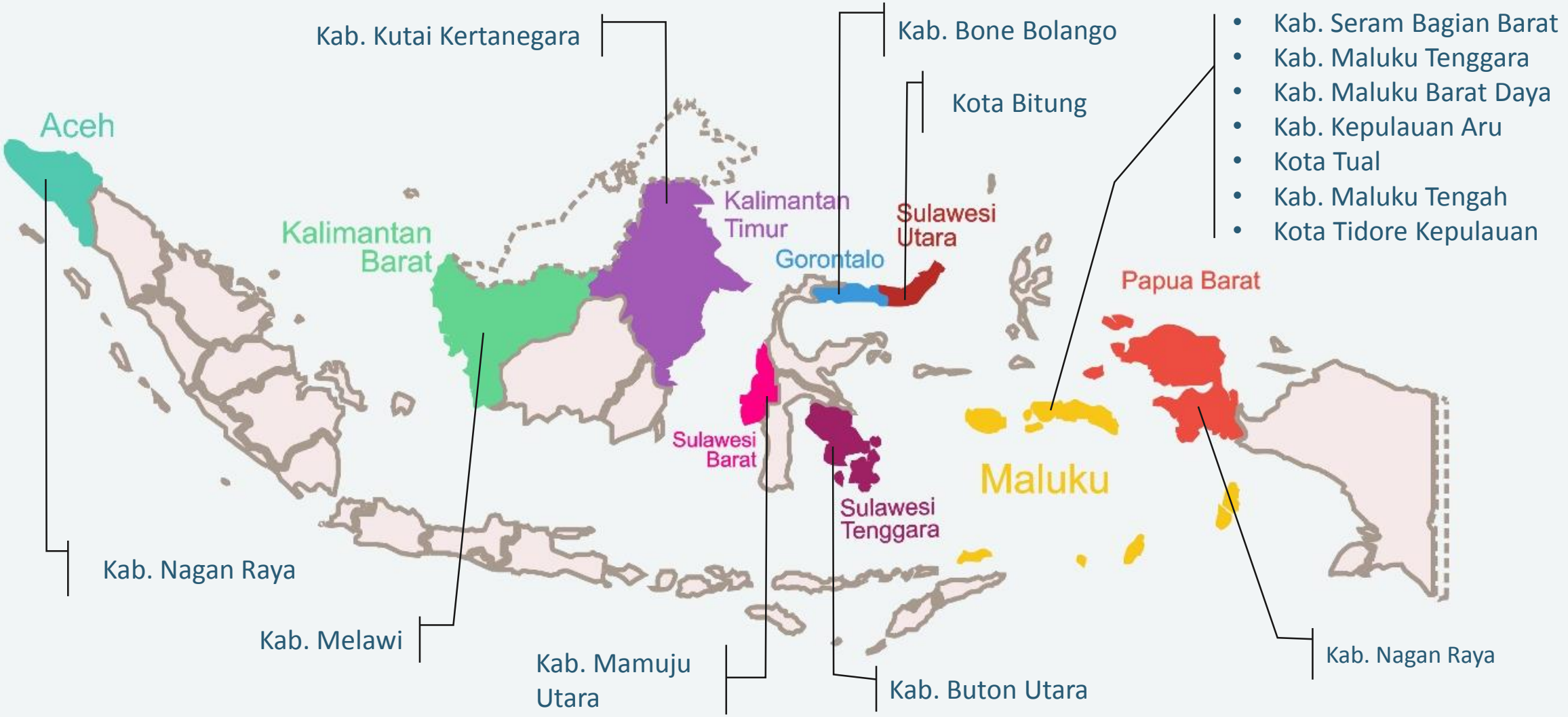

PEMANFAATAN NAWASIS

17 provinsi mengisi menu Infrastruktur*

1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Selatan
4. Sumatera Barat
5. Jambi
6. Jawa Timur
7. Jawa Tengah
8. Jawa Barat
9. Bali
10. Nusa Tenggara Barat
11. Kalimantan Timur
12. Kalimantan Selatan
13. Kalimantan Barat
14. Sulawesi Utara
15. Sulawesi Tenggara
16. Sulawesi Selatan
17. Sulawesi Barat

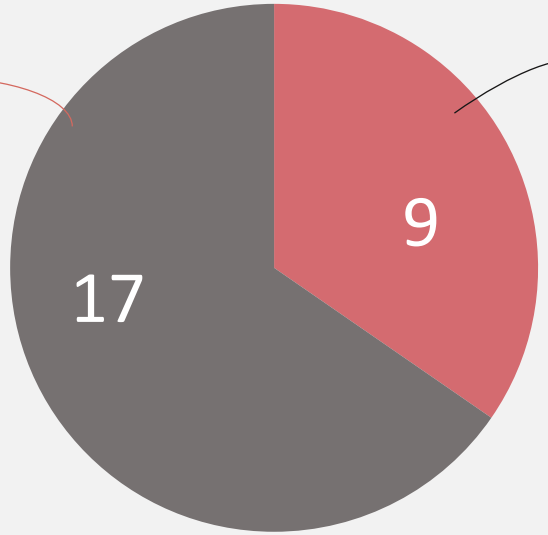

Ket.: Data diolah dari Nawasis (per Maret 2018)

9 Provinsi mengisi menu Investasi**

1. Sumatera Utara
2. Riau
3. Sumatera Selatan
4. Jawa Barat
5. Jawa Tengah
6. Jawa Timur
7. Nusa Tenggara Barat
8. Kalimantan Selatan
9. Sulawesi Utara

*) Tidak semua kabupaten/kota pada 17 provinsi tersebut yang mengisi menu infrastruktur. Hanya beberapa kabupaten/kota yang mengisi menu infrastruktur secara lengkap (minimal 4 jenis infrastruktur sanitasi).

Menu ini penting untuk:

- Mengetahui kebutuhan daerah dalam penyediaan infrastruktur sanitasi
- Mengetahui *Performance* infrastruktur
- Menjadi dasar perencanaan alokasi anggaran

**) Tidak semua kabupaten/kota di 9 provinsi tersebut mengisi menu investasi. Hanya beberapa kabupaten/kota yang mengisi menu investasi secara rutin.

Menu investasi pada Nawasis penting untuk:

- Evaluasi alokasi pendanaan sektor sanitasi
- Perencanaan alokasi pendanaan

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PROVINSI

PENGUATAN KUALITAS SUBSTANSI
MELALUI FORM QA SUBSTANSI

- **Target benar**
  - Akses universal
  - Akses aman
  - STOP BABS (0% BABS)
- **Sesuai tahapan pengembangan**
- **Kebutuhan infrastruktur**
- **Terdapat regulasi mengenai:**
  - Tarif/retribusi
  - Lembaga pengelola
  - Sistem pengelolaan layanan
- **Ada kelembagaan pengelola layanan**
  Dinas/UPTD/BLUD/Perusahaan Daerah

MENUJU IMPLEMENTASI PPSP

- Provinsi harus **mengawal substansi** dan mendorong kabupaten/kota untuk melakukan pemutakhiran SSK.
- Harus terdapat **PF Implementasi** di provinsi
- Kabupaten/kota harus mandiri dalam **penyediaan fasilitator (CF)**

CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN AIR MINUM

Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB | **GOAL 6** | **6.1 Akses universal air minum aman dan terjangkau**

Capaian Akses Layak Air Minum 2017

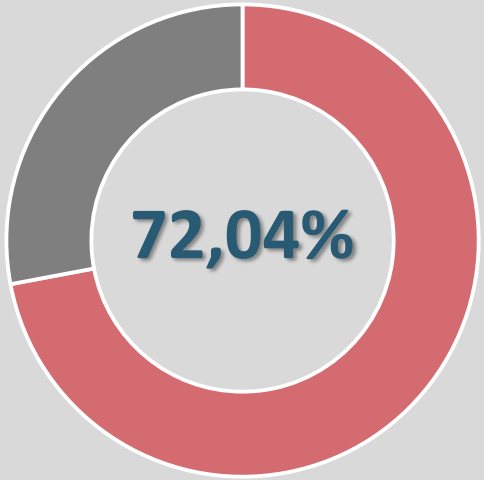

TARGET **2019** — 100% LAYAK

82 juta jiwa penduduk yang harus dilayani akses air minum layak sampai tahun 2019

UNIVERSAL ACCESS

TARGET **2030** — 100% AMAN

RENCANA PENGAMANAN AIR MINUM (RPAM)

CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SANITASI (AIR LIMBAH)

Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB **GOAL 6**

6.2 Akses universal sanitasi layak dan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
6.3 Pengurangan air limbah yang tidak diolah

Capaian Akses 2017

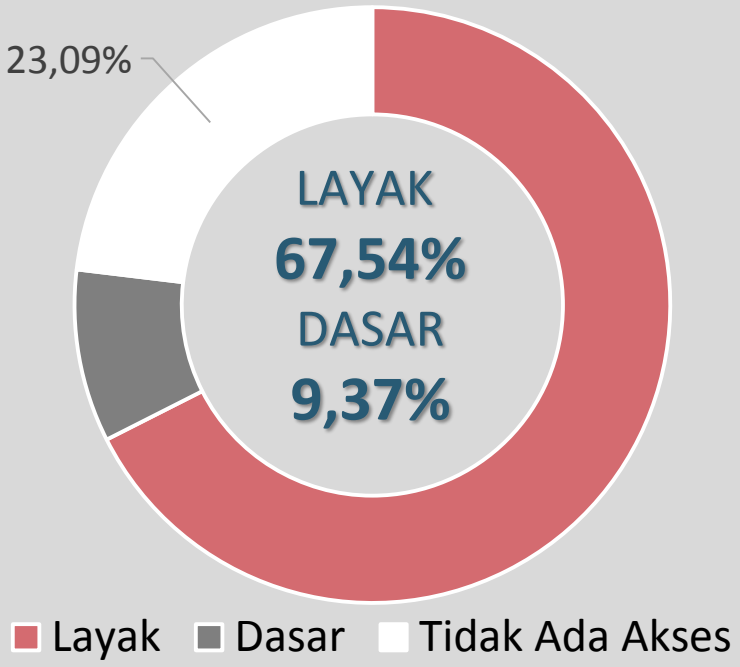

TARGET **2019**

LAYAK 85%

DASAR 15%

- **70 juta jiwa penduduk** yang harus dilayani sanitasi layak sampai **tahun 2019**
- **27 juta jiwa penduduk** harus STOP BABS
- Perlu **pembangunan IPLT** di **37 kab/kota**

TARGET **2030**

100% AMAN

UNIVERSAL ACCESS

STBM

Inisiatif FSM (*Fecal Sludge Management*)

Jaringan Perpipaan (*Sewerage*)

CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SANITASI (PERSAMPAHAN)

Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB | **GOAL 11** | **11.6 Penanganan Sampah**

Capaian Akses 2017

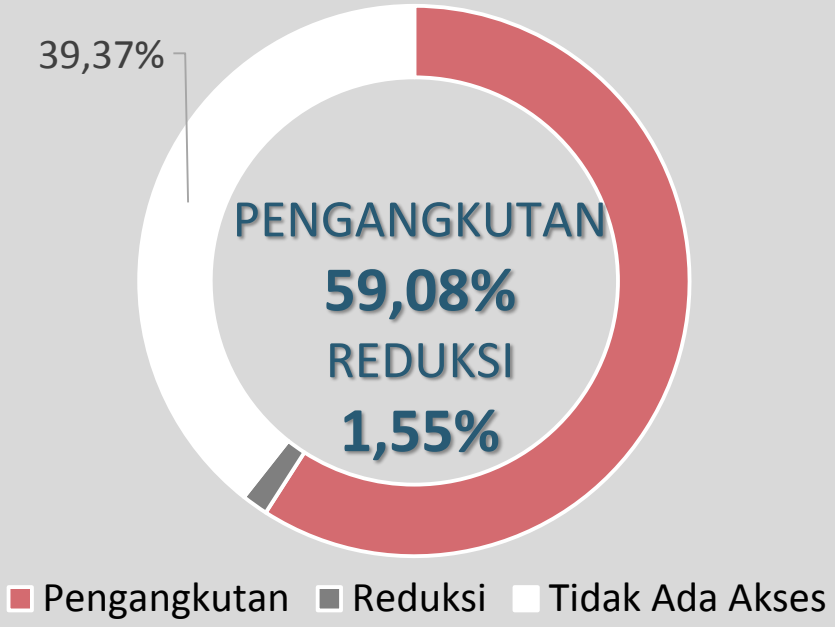

TARGET 2019

PENGANGKUTAN 80%

REDUKSI 20%

- **103 juta jiwa penduduk** yang harus dilayani persampahan sampai **tahun 2019**
- Perlu **pembangunan TPA** di **102 kab/kota**
- **115 kab/kota** diproyeksikan memerlukan TPA baru dalam waktu dekat

TARGET 2030

100% TERTANGANI

Reduksi Sampah/3R

Pembangunan Infrastruktur (TPA, TPST)

KAMPANYE

POTENSI PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI

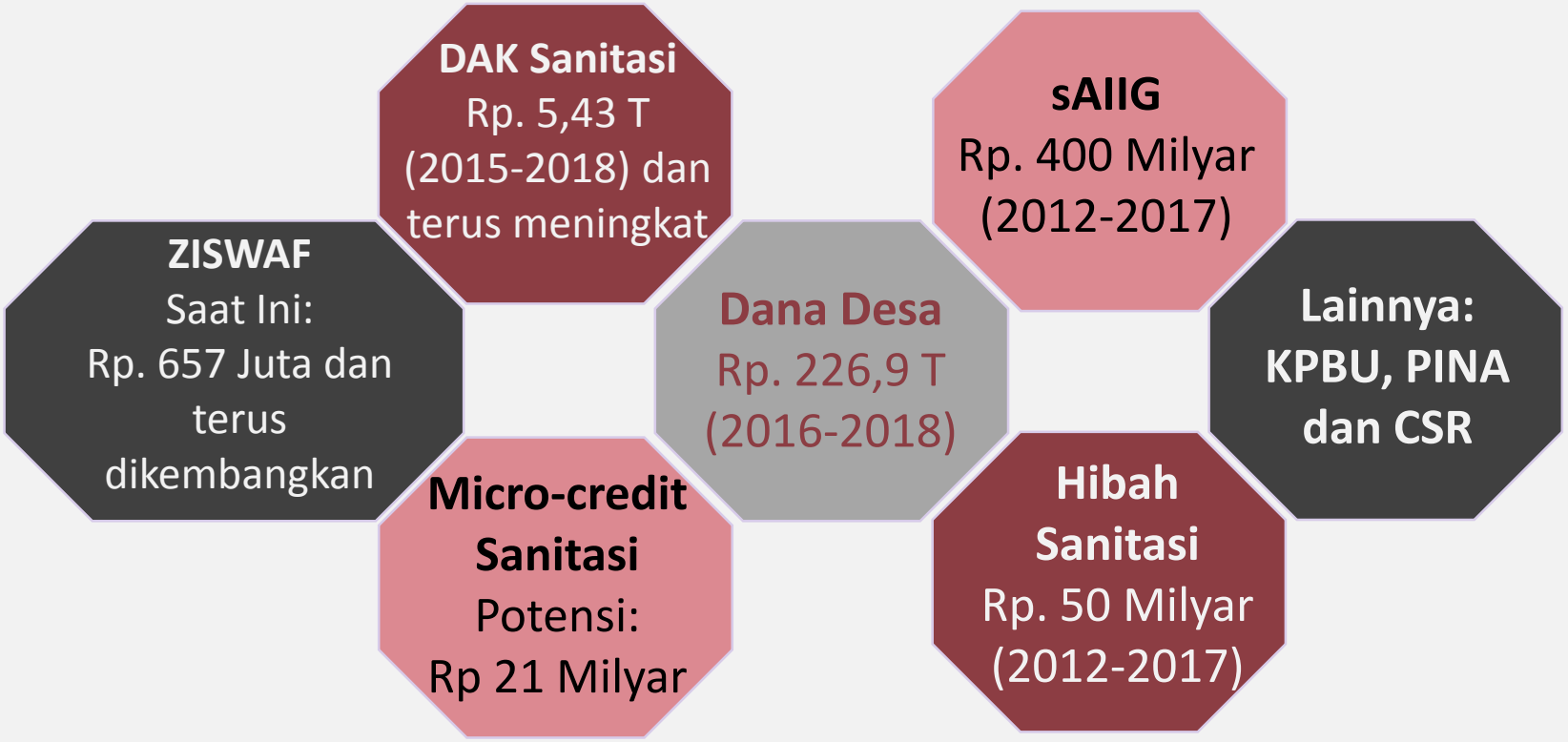

Dan akan dikembangkan skema nasional-nya

DKI Jakarta, Bandung, Surakarta, Banjarmasin

Dalam mendukung implementasi dan memperoleh potensi pendanaan yang ada, maka provinsi harus mampu melakukan:

ADVOKASI

KEPADA KEPALA DAERAH

INTERNALISASI

SSK KE DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

KOLABORASI

DAN INTEGRASI DENGAN PROGRAM LAINNYA, seperti KOTAKU dan Kesehatan

Terima Kasih

Mari sama–sama kita tingkatkan komitmen bersama untuk penyediaan akses sanitasi dan air minum!

POKJA PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI (Pokja PPAS)

No. Kep. 23/D.VI/02/2018

Pokja PPAS Nasional menangani 3 (tiga) bidang

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Penyediaan dan pembiayaan perumahan
- Jaminan kepastian bermukim
- Pengentasan kawasan permukiman kumuh

2 Air Minum dan Sanitasi

- Pengembangan air minum dan sanitasi
- Pembangunan sistem penyediaan air minum
- Pengembangan sistem pengelolaan air limbah, drainase lingkungan dan persampahan

3 Advokasi dan Peningkatan Kapasitas

- Peningkatan kepedulian dan kapasitas pemangku kepentingan
- Peningkatan kolaborasi sumber daya pembangunan di pusat dan daerah

POKJA PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI (Pokja PPAS)

No. Kep. 23/D.VI/02/2018

Pokja PPAS Nasional bertugas:

Membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah Pembangunan PPAS Nasional

- Merumuskan rekomendasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan PPAS
- Koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan PPAS
- Menyiapkan arahan kebijakan RPJPN 2005-2025, RPJMN 2015-2019, dan SDGs 20130 tujuan 6 dan tujuan 11
- Mengembangkan skema pembiayaan dan pendanaan yang berasal dari dalam dan luar negeri, termasuk non pemerintah sesuai peraturan yang berlaku

Melaksanakan pembinaan teknis kepada kelompok kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Berkoordinasi dengan kelompok kerja daerah, terutama dengan kelompok kerja di tingkat provinsi

CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SANITASI (PERSAMPAHAN)

Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB | **GOAL 11** | **11.6 Penanganan Sampah**

TPA EKSISTING 2017

370 KAB/KOTA
SUDAH MEMILIKI AKSES TERHADAP TPA → KURANG DARI **20 unit TPA** BEROPERASI DENGAN METODE SANITARY LANDFILL

PERLU PEMBANGUNAN TPA DI **102 KAB/KOTA** → **115 KAB/KOTA** LAINNYA DIPROYEKSIKAN MEMERLUKAN TPA BARU DALAM WAKTU DEKAT

CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SANITASI (AIR LIMBAH)

Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB | **GOAL 6** | **6.3 Pengurangan air limbah yang tidak diolah**

IPLT EKSISTING 2017

253 KAB/KOTA
SUDAH MEMILIKI AKSES TERHADAP IPLT

PERLU PEMBANGUNAN IPLT DI **37 KAB/KOTA**

→ KURANG DARI **10%** YANG BEROPERASI OPTIMAL

INISIATIF *FECAL SLUDGE MANAGEMENT* (FSM)